

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwin, Muhadjir. 1996. *Pengembangan Aparatur Pemerintah Indonesia dalam Riza Noer Arfani. Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Rajawali Press, Jakarta.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi*. RMBooks.
- Hadi Setia Tunggal, 2007, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-1/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua, Jakarta: Harvarindo
- Jabra and Dwivedi. 1998. *Public Sector Accountability*. Connectual. Kemarin Press, Inc.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (2018). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 182-204). Routledge.
- Salossa, Thobias dan Maryunani. 2013. *Respek Rencana Strategis Pembangunan Kampung*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Trijono, Lambang, 2013. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Burdam, J., & Laka, B. M. (2022). Efektivitas Dana Otonomi Khusus dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4219-4228.
- Junaedi, A. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2), 183-199.
- Kuddy, A. L. L. (2018). Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai. *Jumabis*, 2(1), 259837.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585-592.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1-7.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.

- Oktavian, H., Mustafa, D., & Pananrangi, A. R. (2024). Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Paradigma Journal of Administration*, 2(1), 19-28.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.